

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Kamis, 16 Mei 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Republika (Halaman 4)	Kamis, 16 Mei 2019	Lokasi Ibukota Baru Diputuskan Tahun Ini	Publik diminta tidak berspekulasi. Finalisasi kajian pemindahan ibukota negara dipastikan selesai tahun ini. Lokasi ibukota baru akan ditentukan oleh Presiden Joko Widodo sebelum pergantian tahun mendatang, pun dengan pembentukan badan otoritasnya. Kepala Bappenas/PPN, Bambang Brodjonegoro, mengatakan finalisasi kajian dan penentuan lokasi ibukota baru diselesaikan tahun ini agar pembangunan dapat dimulai dalam satu hingga dua tahun mendatang.
2	Media Indonesia (Halaman 5)	Kamis, 16 Mei 2019	Groundbreaking Ibukota Baru Dimulai 2021	Publik diingatkan agar tidak berspekulasi di daerah mana yang akan menjadi lokasi pemindahan ibukota negara. Hal ini untuk menghindari kerugian. Pemerintah merampungkan kajian final mengenai pemindahan ibukota negara tahun ini. Sementara itu, proses pembangunan awal atau groundbreaking ibukota baru rencananya dilakukan pada 2021.
3	Media Indonesia (Halaman 9)	Kamis, 16 Mei 2019	Tol Becakayu bakal Gusur Rumah Menteri	Trase kedua pembangunan tol layang Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) diubah lantaran desakan Pemerintah Kota Bekasi. Perubahan trase tersebut diprediksi akan menggusur rumah pribadi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Komplek Rawa Semut, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.
4	Bisnis Indonesia (Halaman 4)	Kamis, 16 Mei 2019	Pemindahan Ibukota 2021: Mulai Ground Breaking	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa groundbreaking pembangunan ibukota baru di Pulau Kalimantan akan dilakukan pada 2021.
5	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Kamis, 16 Mei 2019	Tarif Tol Trans-Jawa: Besaran Diskon Diputuskan H-10 Lebaran	Kalangan operator jalan tol memperkirakan keputusan final terkait dengan pemberian potongan tarif di koridor Trans-Jawa selama masa angkutan Lebaran 2019 bakal terbit 10 hari mendatang. Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk. Desi Aryani mengatakan bahwa kalangan operator yang tergabung dalam Asosiasi Tol Indonesia (ATI) masih melakukan diskusi terkait dengan pemberian diskon.
6	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Kamis, 16 Mei 2019	Berita Foto	Kendaraan melintas di jalur lingkaran utara (jalinkut) Tegal, Jawa Tengah, Rabu (15/5). Jalinkut merupakan satu-satunya jalur pengalihan arus lalu lintas di Kota Tegal yang dapat digunakan pemudik ketika terjadi kemacetan dan kepadatan di jalur pantai utara Jawa.
7	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Kamis, 16 Mei 2019	Sumber Daya Air: Penyelesaian Waduk Kuningan Terkendala Ganti Rugi	Penyelesaian Waduk Kuningan bertambah lama karena masih terhambat urusan ganti rugi dan relokasi warga. Kepala Pusat Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ni Made Sumiarsih mengatakan bahwa saat hambatan tersebut sedang ditangani dan dalam proses finalisasi.
8	Bisnis Indonesia (Halaman 23)	Kamis, 16 Mei 2019	IAI Siap Sulap Calon Ibu Kota Baru	Ikatan Arsitek Indonesia siap menciptakan desain ibukota baru sebagaimana yang diharapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. "Melihat dari pengalaman yang sudah pernah kami lakukan, IAI pasti siap menyambut rencana ini. Kami yakin dari 19.000 anggota yang

				terdiri atas 6.000 anggota profesional besertifikat, secara kapasitas dan kompetensi kami sudah siap,” tutur Wakil sekretaris Jenderal Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Denny Setiawan kepada Bisnis, Rabu (15/5).
9	Bisnis Indonesia (Halaman 25)	Kamis, 16 Mei 2019	100 Smart City: Gengsi Daerah Hambat Program Kota Pintar	Gengsi antarkepala daerah dinilai menjadi kendala program pengembangan 100 Kota Pintar yang sedang dicanangkan pemerintah. Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di sela-sela acara Gerakan Menuju 100 Smart City, Rabu (15/5). “Ada gengsi [dari] beberapa daerah yang segan atau tidak mau meniru daerah lain yang sudah berprestasi,” tuturnya.
10	Kompas (Halaman 1)	Kamis, 16 Mei 2019	Berita Foto	Foto udara Jalan Tol Trans-Jawa di Gerbang Tol Probolinggo Timur, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (15/5/2019). Gerbang Tol Probolinggo Timur merupakan ujung paling timur Jalan Tol Trans-Jawa saat ini karena ruas Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi belum dibangun.
11	Kompas (Halaman 15)	Kamis, 16 Mei 2019	Pascabencana Sulteng: Relokasi Berpotensi Bermasalah	Lahan untuk relokasi penyintas di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berpotensi bermasalah. Hal itu karena pemerintah tak punya anggaran untuk membebaskan lahan. Pemerintah berharap pemilik tanah menghibahkan tanahnya.
12	Kompas (Halaman 16)	Kamis, 16 Mei 2019	Bawen Paling Diantisipasi	Persiapan keselamatan dan kenyamanan para pemudik jelang arus mudik Lebaran terus dilakukan di titik simpul kemacetan, terutama di wilayah Bawen, Jawa Tengah.
13	Kompas (Halaman 20)	Kamis, 16 Mei 2019	Perkotaan : Kota Perlu Perencanaan dan Inovasi	Perencanaan tata kota yang baik, dipadukan dengan komitmen kepala daerah, akan memberi pelayanan yang lebih baik bagi warga kota. Kepala daerah juga dituntut menciptakan inovasi untuk menjawab aneka persoalan kota yang kian kompleks.
14	Kompas (Halaman 24)	Kamis, 16 Mei 2019	BASUKI HADIMULJONO: Digusur Jalan Tol	Banyak ruas jalan tol dibangun ketika Basuki Hadimuljono menjabat Menteri PUPR. Namun, ternyata kediaman pribadi Basuki juga akan terkena jalur pembangunan Jalan Tol Becakayu.

Judul	Lokasi Ibukota Baru Diputuskan Tahun Ini	Tanggal	Kamis, 16 Mei 2019
Media	Republika (Halaman 4)		
Resume	Publik diminta tidak berspekulasi. Finalisasi kajian pemindahan ibukota negara dipastikan selesai tahun ini. Lokasi ibukota baru akan ditentukan oleh Presiden Joko Widodo sebelum pergantian tahun mendatang, pun dengan pembentukan badan otoritasnya. Kepala Bappenas/PPN, Bambang Brodjonegoro, mengatakan finalisasi kajian dan penentuan lokasi ibukota baru diselesaikan tahun ini agar pembangunan dapat dimulai dalam satu hingga dua tahun mendatang.		

Lokasi Ibu Kota Baru Diputuskan Tahun Ini

Publik diminta tidak berspekulasi.

JAKARTA — Finalisasi kajian pemindahan ibu kota negara dipastikan selesai tahun ini. Lokasi ibu kota baru akan ditentukan oleh Presiden Joko Widodo sebelum pergantian tahun mendatang, pun dengan pembentukan badan otoritasnya.

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas/PPN), Bambang Brodjonegoro, mengatakan, finalisasi kajian dan penentuan lokasi ibu kota baru diselesaikan tahun ini agar pembangunan dapat dimulai dalam satu hingga dua tahun mendatang. Namun, pemerintah menargetkan paling lambat 2021 *groundbreaking* pembangunan ibu kota baru telah dimulai jika presiden merestui.

"Lokasi diputuskan tahun ini sehingga proses penyiapan, perencanaan kawasan, dan konstruksi segera dimulai sehingga diharapkan 2024 ibu kota baru sudah fungsional dan siap jadi pusat pemerintahan baru," tutur Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (15/5).

Bambang menjelaskan, pusat perkantoran akan menggunakan lahan seluas 2.000 hektare. Sementara itu, total luasan ibu kota baru diputuskan seluas 40 ribu hektare yang dapat menampung 1,5 juta penduduk baru.

Menurut dia, pemerintah juga

tengah berkoordinasi dengan sejumlah asosiasi pengusaha terkait pembangunan tersebut.

Pascalokasi ibu kota baru diputuskan, badan otoritas yang akan mengawal pembangunan secara bersamaan akan dibentuk. Badan tersebut, kata Bambang, bertanggung jawab langsung kepada presiden.

"Pembentukan badan ini tentunya juga bisa melibatkan BUMN yang akan bergerak di lapangan. Nanti sekaligus diputuskan presiden," kata dia.

Bambang menjelaskan, fungsi badan otoritas untuk mengawal sekaligus mengawasi pembangunan ibu kota baru dari mulai persiapan *groundbreaking* hingga tuntas. Badan tersebut juga bertugas untuk memimpin koordinasi dan mengawasi antarkementerian dan lembaga terkait.

Badan otoritas beranggotakan dari masing-masing kementerian dan lembaga terkait serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat langsung dalam pembangunan di lapangan.

"Badan ini tentu akan langsung berada di bawah Presiden sehingga tanggung jawabnya kepada kepala negara," kata Bambang.

Ia pun menegaskan, pembentukan badan otoritas tidak memerlukan persetujuan dari DPR RI. Sebab, wilayah badan tersebut ada pada tangan eksekutif negara.

Adapun pengumuman lokasi ibu

kota baru, mantan menteri keuangan itu memastikan akan diumumkan pada tahun ini. Sebab, pemerintah menargetkan *groundbreaking* pembangunan ibu kota baru dapat dilakukan pada 2021 mendatang dan fungsional ibu kota mulai tahun 2024.

Sementara itu, untuk menjaga agar spekulasi harga tanah tak berulah di lokasi yang dipilih, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menerapkan pembekuan tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan.

Sebagaimana diketahui, empat provinsi yang dipilih menjadi alternatif pembangunan ibu kota baru, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat. Presiden Joko Widodo pada awal bulan ini telah meninjau Bukit Soeharto di Kalimantan Timur dan Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memastikan upaya pencegahan munculnya para spekulasi tanah di lokasi ibu kota baru terpilih. Upaya itu akan ditempuh melalui pembekuan tanah yang dijadikan sebagai tempat pembangunan.

Kepala BPN, Sofyan Djalil, mengungkapkan, pihaknya segera melakukan pendataan tentang status penguasaan, kepemilikan, dan manfaat dari tanah yang ada. Setelah semua data lengkap, pembekuan tanah siap diterapkan.

"Kami akan lakukan pembekuan. Siapa pun tidak boleh menjual tanah kepada siapa pun. Kecuali, kepada otoritas atau BUMN. Itu untuk tanah individu," kata Sofyan.

Lebih lanjut, Sofyan menyampaikannya, adapun untuk tanah negara yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) maupun lahan pertambangan memiliki jangka waktu untuk kembali ke tangan pemerintah. Karena itu, kata dia, sedapat mungkin pembangunan ibu kota baru mengoptimalkan menggunakan tanah-tanah yang secara administratif dimiliki negara.

"Saran saya, jangan berspekulasi. Nanti rugi," kata Sofyan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menegaskan, keberadaan jalan nasional, bendungan, dan bandara bertaraf internasional ikut menjadi tolok ukur pemilihan lokasi.

Basuki mengatakan, finalisasi kajian masterplan ibu kota baru diharapkan rampung maksimal dalam dua bulan ke depan. Oleh sebab itu, Basuki menyebut, laporan kajian final pembangunan ibu kota baru oleh Bappenas, Kementerian PUPR, dan BPN dapat diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada Juli mendatang.

"Nanti presiden bisa memutuskan. Kalau belum yakin, kita akan lihat lagi sampai semuanya benar-benar final," kata Basuki.

■ dedy darmawan nasution ed: fuji pratiwi

Judul	Groundbreaking Ibukota Baru Dimulai 2021	Tanggal	Kamis, 16 Mei 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 5)		
Resume	Publik diingatkan agar tidak berspekulasi di daerah mana yang akan menjadi lokasi pemindahan ibukota negara. Hal ini untuk menghindari kerugian. Pemerintah merampungkan kajian final mengenai pemindahan ibukota negara tahun ini. Sementara itu, proses pembangunan awal atau groundbreaking ibukota baru rencananya dilakukan pada 2021.		

Groundbreaking Ibu Kota Baru Dimulai 2021

Publik diingatkan agar tidak berspekulasi di daerah mana yang akan menjadi lokasi pemindahan ibu kota negara. Hal ini untuk menghindari kerugian.

NUR AIVANNI
nur@mediaindonesia.com

PEMERINTAH akan merampungkan kajian final mengenai pemindahan ibu kota negara tahun ini. Sementara itu, proses pembangunan awal atau *groundbreaking* ibu kota baru rencananya dilakukan pada 2021. "Kita harapkan 2024 ibu kota baru sudah fungsional, sudah siap jadi

pusat pemerintahan baru," ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sesuai rapat koordinasi terkait pemindahan ibu kota negara di Jakarta, kemarin.

Hadir pada kesempatan itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil. "Tadi dalam rapat kita melakukan koordinasi untuk finalisasi dari kajian ini tahun

ini sehingga keputusan untuk memilih lokasi juga bisa dilakukan pada tahun ini juga," ujar Bambang.

Bambang mengungkapkan, kajian final pemindahan ibu kota negara akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk diambil keputusan politiknya. "Beliau (Presiden) harus dapat semua informasi yang paling lengkap sesuai dengan studi lapangan yang dilakukan," terangnya.

Menurut Bambang, apabila kajian tersebut rampung, pemerintah akan bergerak ke aspek perencanaan kawasan. "Itu sudah masuk ranah Pak Basuki menyiapkan masterplan kotanya sampai perencanaan kawasannya," katanya.

Minimalkan dana APBN

Terkait dengan anggaran pemindahan ibu kota negara, Bambang menjelaskan, pemerintah akan berupaya untuk meminimalisasi penggunaan anggaran dari APBN. "Meski ada, tapi seminimal mungkin. Kita akan lebih banyak melibatkan swasta dalam negeri dan BUMN dan ada skema kerja sama pemerintah dan badan usaha," terangnya.

Untuk porsi anggaran antara APBN dan pihak swasta, pemerintah akan menghitung kembali anggaran yang harus dikeluarkan. Dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu, ungkapnya, porsi antara APBN dan swasta masing-masing 50%. "Kita masih akan men-

data lagi bagaimana kita bisa menurunkan ketergantungan APBN," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengingatkan kepada publik agar tidak berspekulasi di daerah mana yang akan menjadi lokasi pemindahan ibu kota negara. "Saran saya jangan berspekulasi, nanti rugi," katanya.

Nantinya, kata Sofyan, pihaknya akan melakukan pendataan tentang penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah yang akan dijadikan lokasi pemindahan ibu kota negara. "Begitu (lokasi) diputuskan, kita akan *freeze*. Siapa pun tidak boleh jual tanah ke siapa pun kecuali otoritas atau BUMN yang bangun kota, kalau itu tanah individu," tuturnya.

Pemerintah saat ini memiliki empat provinsi yang menjadi kandidat ibu kota baru, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat. Dari empat wilayah itu, dua wilayah sudah ditinjau langsung Presiden Jokowi. (P-4)

Judul	Tol Becakayu bakal Gusur Rumah Menteri	Tanggal	Kamis, 16 Mei 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 9)		
Resume	Trase kedua pembangunan tol layang Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) diubah lantaran desakan Pemerintah Kota Bekasi. Perubahan trase tersebut diprediksi akan menggusur rumah pribadi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Komplek Rawa Semut, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.		

Tol Becakayu bakal Gusur Rumah Menteri

TRASE kedua pembangunan tol layang Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) diubah lantaran desakan Pemerintah Kota Bekasi. Perubahan *trase* tersebut diprediksi akan menggusur rumah pribadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono di Komplek Rawa Semut, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Seperti yang diketahui, pengerjaan tol layang Becakayu dilanjutkan pada awal 2015 lalu setelah mangkrak puluhan tahun. Ruas tol tersebut memiliki panjang 21 kilometer. Pengerjaan *trase*-nya dibagi menjadi dua tahap.

Tahap pertama sepanjang 11,8 kilometer dari DI Panjaitan sampai Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Adapun *trase* kedua dari Jakasampurna, Bekasi Barat, sampai Jalan Raya Ganda Agung, Bekasi Timur, sejauh 9,2 kilometer. Saat ini pengerjaan sudah memasuki *trase* 2a.

Namun, di tengah perjalanan pembangunannya, Pemerintah Kota Bekasi menuntut *trase* kedua diubah. Alasannya, desain *trase* kedua sebelumnya sudah tidak lagi relevan dengan kondisi estetika Kota Bekasi saat ini.

Kepala Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah (IPW) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Erwin Guwinda menyampaikan, rencana perubahan rute *trase* kedua tol layang Becakayu sudah berhembus sejak akhir 2017 kemarin. Adapun, landasan perubahan *trase* tersebut adalah masalah estetika dan nilai ekonomis pembangunan jalan tol layang Becakayu.

“Dari rapat terakhir hari ini dengan Kementerian PU-Pera dan BPJT resmi berubah. Kabarannya rumah Menteri PU-Pera dan tetangganya ikut kena gusur,” ungkap Erwin, kemarin.

Erwin mengaku, hingga saat ini Pemkot Bekasi belum menerima Detail Engineering Design (DED) perubahan *trase* kedua dari pemerintah pusat. Sehingga pihaknya belum bisa menganalisis wilayah mana saja yang akan terkena dampak pembangunan.

Namun, kata Erwin, *trase* yang berubah tidak akan mengubah tujuan awal pembangunan tol layang Becakayu. (Gan/f-1)

Judul	Pemindahan Ibukota 2021: Mulai Ground Breaking	Tanggal	Kamis, 16 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 4)		
Resume	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa groundbreaking pembangunan ibukota baru di Pulau Kalimantan akan dilakukan pada 2021.		

► PEMINDAHAN IBU KOTA

2021 Mulai Ground Breaking

Bisnis, JAKARTA — Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa *groundbreaking* pembangunan ibu kota baru di Pulau Kalimantan akan dilakukan pada 2021.

“Pada 2021 itu kami rencanakan untuk *ground breaking*,” tutur Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, usai menggelar Rapat Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, di Gedung Bappenas, terkait Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Rabu (15/5).

Kepala Bappenas menyatakan bahwa sebelum dilakukan *groundbreaking* akan dilakukan penyiapan lapangannya terlebih dahulu mulai setahun hingga 2 tahun ke depan.

Pihaknya menegaskan bahwa tahun ini pemerintah menargetkan akan mulai mengumumkan nama calon ibu kota baru yang bakal dipakai sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru.

Selain itu, lanjut Bambang, Kementerian PUPR baru akan mulai menyiapkan infrastruktur dasarnya di lokasi yang bakal dijadikan ibu kota baru tersebut. Adapun pada 2024, ditargetkan sudah dapat digunakan secara fungsional. “Rencananya untuk yang *government* itu sekitar 2.000 hektare, dan keseluruhan kotanya 40.000 hektare,” terangnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan bahwa rencana *groundbreaking* pada 2021 tersebut masih harus diusulkan dan mendapatkan persetujuan Presiden Jokowi.

Menurutnya, *groundbreaking* tersebut apakah pada awal tahun, pertengahan tahun, atau akhir 2021, nanti berdasarkan putusan Presiden Jokowi.

Judul	Tarif Tol Trans-Jawa: Besaran Diskon Diputuskan H-10 Lebaran	Tanggal	Kamis, 16 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Kalangan operator jalan tol memperkirakan keputusan final terkait dengan pemberian potongan tarif di koridor Trans-Jawa selama masa angkutan Lebaran 2019 bakal terbit 10 hari mendatang. Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk. Desi Aryani mengatakan bahwa kalangan operator yang tergabung dalam Asosiasi Tol Indonesia (ATI) masih melakukan diskusi terkait dengan pemberian diskon.		

► TARIF TOL TRANS-JAWA

Besaran Diskon Diputuskan H-10 Lebaran

Bisnis, NGAMPRAH — Kalangan operator jalan tol memperkirakan keputusan final terkait dengan pemberian potongan tarif di koridor Trans-Jawa selama masa angkutan Lebaran 2019 bakal terbit 10 hari mendatang.

Krizia P. Kinanti & Rivki Maulana
redaksi@bisnis.com

Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk. Desi Aryani mengatakan bahwa kalangan operator yang tergabung dalam Asosiasi Tol Indonesia (ATI) masih melakukan diskusi terkait dengan pemberian diskon.

Hasil dari pembahasan ini akan menjadi usulan operator kepada Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat.

“Pak Menteri PUPR arahnya agar ATI mengajukan usulan. Kami masih mau komunikasikan kepada BUJT [badan usaha jalan tol]. Jadi, belum ada keputusan final,” ujarnya di Walini, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (14/5).

Desi yang juga Ketua Umum ATI menambahkan bahwa kepastian pemberian diskon bakal diputuskan H-10 Idulfitri atau pada 25 Mei 2019.

Oleh karena itu, hingga saat ini, besaran tarif maupun mekanisme pemberian diskon belum final.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap supaya kalangan operator memberi potongan tarif kepada pengguna jalan tol saat masa angkutan Lebaran. “Saya *appeal* mereka untuk kasih diskon, nanti mereka bicarakan. Mudah-mudahan bisa,” ujarnya pekan lalu.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, hingga saat ini operator masih memberlakukan potongan tarif sebesar 15% bagi pengguna jalan tol yang melintas di satu klaster penuh (*barrier to barrier*).

► Penerapan sistem satu arah di tol Trans-Jawa ini berlaku selama 7 hari.

Masa angkutan Lebaran tahun ini akan dipadati pemudik yang menggunakan jalur darat, terutama jalan tol.

Kementerian Perhubungan sebelumnya melansir bahwa sebanyak 40% pemudik yang menggunakan jalur darat akan melintas di jalan tol dengan perkiraan 399.962 kendaraan.

SATU ARAH

Pada bagian lain, Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan bahwa pengaturan lalu lintas termasuk sistem satu arah merupakan domain Korps Polisi Lalu Lintas (Korlantas) dan keputusannya ada pada Kementerian Perhubungan.

Meski begitu, katanya, persoalan ini perlu diperdalam dan semua pihak dapat saling membantu dalam periode Lebaran mendatang.

“Tentu butuh perencanaan, dan pengusaha bus antarkota perlu melakukan penyesuaian. Namun, kalau harapannya meningkatkan kelancaran, bukankah dengan sistem [satu arah] tersebut ritase atau *cycle time* bus akan membaik,” ujarnya ketika dihubungi *Bisnis* di Jakarta, Rabu (15/5).

Danang dimintai tanggapannya berkaitan dengan rencana pemerintah menerapkan sistem satu arah di tol Trans-Jawa pada masa mudik Lebaran mulai dari KM 29 Cikarang Utama hingga KM 262 di Brebes Barat. Kemudian, penerapan satu arah saat arus balik berlaku mulai

Diskon sudah diberikan operator kepada pengguna jalan tol sejak 21 Januari 2019. Sejak saat itu, seluruh jalan tol di koridor Trans-Jawa resmi tersambung dan mulai memberlakukan tarif.

Secara umum, koridor Trans-Jawa dibagi ke dalam empat klaster dengan diskon hanya berlaku klaster 2, 3, dan 4.

Pada klaster 2, diskon diberikan untuk pengguna jalan tol yang masuk di gerbang tol (GT) Palimanan dan keluar di GT Kali Kungkung maupun sebaliknya.

Sementara itu, di klaster 3 dan 4, diskon diberikan untuk pelintas di GT Banyumanik—GT Warugunung dan GT Kejapanan—GT Grati.

Dalam publikasi yang diterbitkan Badan Pengatur Jalan Tol, tarif dengan jarak tempuh terjauh di koridor Trans-Jawa, yakni Merak—Probolinggo dipatok Rp777.500 untuk kendaraan golongan I.

Adapun, tarif pelintas Jakarta—Probolinggo dibanderol Rp727.500. Simulasi tarif ini tidak menghitung ruas Pasuruan—Probolinggo yang hingga 29 April 2019 belum menerapkan tarif.

dari Palimanan hingga KM 29.

Penerapan sistem satu arah di tol Trans-Jawa ini berlaku selama 7 hari. Empat hari saat arus mudik yang berlangsung pada 30 Mei—2 Juni 2019. Lalu dilakukan kembali pada arus balik selama 3 hari yang berlaku pada 8—10 Juni 2019.

Menurut Danang, dengan ritase yang makin membaik hasilnya bisa mengangkut orang lebih banyak dalam periode mudik Lebaran H-10 hingga H+10. Namun, diskusi bersama perlu dilakukan lebih lanjut untuk menyamakan persepsi satu dengan lainnya.

“Kalau perlu memang harus dilakukan diskusi bersama tentang *adjustment* ini antara Organda dan Korlantas, Kemenhub dan PUPR/BPJT. Sejauh dalam pembahasan dan rapat tentang ngkutan Lebaran, Organda tidak menyampaikan keberatan secara resmi,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan menuturkan bahwa kebijakan satu arah tidak sesuai dengan upaya yang digadagadag pemerintah selama ini, yaitu masyarakat diarahkan untuk menggunakan kendaraan umum. 

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 16 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Kendaraan melintas di jalur lingkar utara (jalingkut) Tegal, Jawa Tengah, Rabu (15/5). Jalingkut merupakan satu-satunya jalur pengalihan arus lalu lintas di Kota Tegal yang dapat digunakan pemudik ketika terjadi kemacetan dan kepadatan di jalur pantai utara Jawa.		

► JALUR LINGKAR UTARA TEGAL



Antara/Okky Lukmansyah

Kendaraan melintas di jalur lingkar utara (jalingkut) Tegal, Jawa Tengah, Rabu (15/5). Jalingkut merupakan satu-satunya jalur pengalihan arus lalu lintas di Kota Tegal yang dapat digunakan pemudik ketika terjadi kemacetan dan kepadatan di jalur pantai utara Jawa.

Judul	Sumber Daya Air: Penyelesaian Waduk Kuningan Terkendala Ganti Rugi	Tanggal	Kamis, 16 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Penyelesaian Waduk Kuningan bertambah lama karena masih terhambat urusan ganti rugi dan relokasi warga. Kepala Pusat Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ni Made Sumiarsih mengatakan bahwa saat hambatan tersebut sedang ditangani dan dalam proses finalisasi.		

► SUMBER DAYA AIR

Penyelesaian Waduk Kuningan Terkendala Ganti Rugi

Bisnis, JAKARTA — Penyelesaian Waduk Kuningan bertambah lama karena masih terhambat urusan ganti rugi dan relokasi warga.

Kepala Pusat Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ni Made Sumiarsih mengatakan bahwa saat hambatan tersebut sedang ditangani dan dalam proses finalisasi.

“Betul [masih terhambat ganti rugi dan relokasi], sampai saat ini masih dalam proses,” tuturnya kepada *Bisnis*, Senin (13/5).

Menurut Sumiarsih, pihaknya melakukan percepatan dengan upaya beberapa kali melakukan rapat dengan Sekretariat Negara untuk penyelesaian Waduk Kuningan. Pada Mei 2018, Presiden Joko Widodo meminta agar proyek itu bisa selesai akhir tahun itu juga, tetapi kenyataannya mundur hingga finalisasi ditargetkan April 2019, tetapi proyek tak kunjung rampung.

Sebelumnya, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk—Cisanggarung Happy Mulya memastikan penyelesaian fisik waduk tinggal sentuhan akhir yang ditargetkan tuntas pada April lalu. “Namun, ini masih ada masalah pembebasan lahan yang kami bicarakan dan sedang dicarikan solusinya,” katanya, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, upaya penggenangan belum bisa dilakukan kendati proyek sudah hampir tuntas. Waduk Kuningan merupakan satu dari 65 bendungan yang dibangun untuk mendukung ketahanan pangan dan air. Perkembangan fisik bendungan senilai Rp491 miliar itu menca-

pai 95,77% per akhir Januari. Namun, pembebasan lahan di tujuh desa di Kec. Cibereum, Kuningan, baru mencapai 141,79 hektare atau 80,88%.

Pengerjaan proyek sudah dimulai sejak 2013 dilakukan oleh PT Wijaya Karya Tbk. dan PT Brantas Abipraya KSO selaku kontraktor pelaksana.

Pada bagian lain, Kementerian PUPR terus meningkatkan jumlah tampungan air di Sulawesi Selatan untuk mendukung ketahanan pangan dan air.

Bendungan Karallloe di Kabupaten Gowa merupakan salah satu dari program pembangunan 65 bendungan yang bertujuan menambah tampungan air sehingga kontinuitas suplai air irigasi ke sawah terjaga.

“Saat ini dari 7,30 juta hektare lahan irigasi, hanya 11% yang mendapatkan jaminan air dari bendungan. Melalui program pembangunan 65 bendungan, akan bertambah 19%—20%,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui siaran pers, Selasa (14/5). (*Krizia P. Kinanti*)

Judul	IAI Siap Sulap Calon Ibu Kota Baru	Tanggal	Kamis, 16 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 23)		
Resume	Ikatan Arsitek Indonesia siap menciptakan desain ibukota baru sebagaimana yang diharapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. "Melihat dari pengalaman yang sudah pernah kami lakukan, IAI pasti siap menyambut rencana ini. Kami yakin dari 19.000 anggota yang terdiri atas 6.000 anggota profesional bersertifikat, secara kapasitas dan kompetensi kami sudah siap," tutur Wakil sekretaris Jenderal Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Denny Setiawan kepada Bisnis, Rabu (15/5).		

► LANSKAP TATA KOTA

IAI Siap Sulap Calon Ibu Kota Baru

Bisnis, JAKARTA — Ikatan Arsitek Indonesia siap menciptakan desain ibu kota baru sebagaimana yang diharapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Putri Salsabila
redaksi@bisnis.com

"Melihat dari pengalaman yang sudah pernah kami lakukan, IAI pasti siap menyambut rencana ini. Kami yakin dari 19.000 anggota yang terdiri atas 6.000 anggota profesional bersertifikat, secara kapasitas dan kompetensi kami sudah siap," tutur Wakil sekretaris Jenderal Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Denny Setiawan kepada *Bisnis*, Rabu (15/5).

Denny mengakui bahwa hingga saat ini IAI baru mendapat kabar tentang rencana forum diskusi yang akan diadakan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, dia berharap agar nantinya pemerintah bukan hanya memberi kesempatan IAI untuk menciptakan desain gedung atau penataan lingkungan, melainkan juga pembangunan hingga perancangan kota.

Denny menuturkan bahwa IAI masih menunggu panggilan dan keputusan Presiden atas wilayah ibu kota baru dari empat kandidat wilayah yang masih belum ditentukan, yakni Palangkaraya, Bukit Soeharto, Tangkiling, serta Pulang Pisau.

Menurutnya, IAI akan berusaha untuk menciptakan konsep pembangunan yang diharapkan pemerintah untuk menciptakan ibu kota baru yang memiliki pembangunan berkelanjutan, yakni konsep kota hijau (*green city*), kota pintar (*smart city*), atau kota ringkas (*compact city*) seperti yang diucapkan Menteri PUPR pada Selasa (14/5).

Selaras dengan harapan pemerintah, Denny melanjutkan bahwa IAI tidak ingin kembali mengulangi apa yang terjadi di Jakarta yang hanya masih memiliki ruang terbuka hijau di bawah 30%.

"Nanti, ibu kota baru akan menjadi jauh lebih baik dari kota-kota sebelumnya," ujarnya.

► **Arsitek ingin terlibat dalam desain gedung atau penataan lingkungan, serta pembangunan hingga perancangan kota.**

Arsitek memiliki lima harapan dalam pembangunan di ibu kota. *Pertama*, energi yang dapat diperbaharui seperti penggunaan solar panel atau pembangkit listrik yang tidak menggunakan gas fosil.

Kedua, memfokuskan pada pengolahan limbah agar mampu diolah dengan baik.

Ketiga, penggunaan air secara bijak.

Keempat, penggunaan bahan-bahan

material lokal yang harus diberdayakan.

Selanjutnya, *kelima*, adalah penataan desain kota yang baik dengan memiliki pedestrian yang bagus, akses yang mudah sehingga semua orang dapat menikmati kota.

"Semoga ibu kota baru nanti karena Kalimantan adalah kota sungai kita dapat menggunakan dengan sangat bijaksana, mudah-mudahan kami tidak akan mengubah Kalimantan dari paru-paru hutan menjadi rusak. Semoga kita dapat menjaga dan menjadi contoh untuk negara lain!" ujarnya.

KUMPULKAN ARSITEK

Sebelumnya, guna mempersiapkan desain ibu kota baru yang tepat, Kementerian PUPR mengumpulkan para arsitek di Tanah Air untuk mendapatkan rancangan terbaik.

Menteri Basuki menyatakan bahwa pematangan desain ibu kota tersebut harus segera dilakukan seiring dengan telah disepakatinya rencana pembukaan lahan sebagai lokasi ibu kota baru yang akan dimulai pada 2020.

"Jadi, ketika nanti izinnya sudah keluar dari Badan Pertanahan Nasional,

kami bisa lebih aktif lagi 2020 mendatang. Untuk itu, kami sudah mengumpulkan arsitek untuk mendesain bentuk ibu kota baru nanti," ujarnya, Selasa (14/5) malam.

Menurutnya, akan lebih baik apabila desain ibu kota telah disiapkan sejak dini, daripada ditentukan belakangan, setelah pembukaan lahan.

Pihaknya mengaku bahwa saat ini sudah mengumpulkan sejumlah tim yang terdiri atas tujuh orang arsitek setiap tim.

Nantinya, tim arsitek ini akan mengikuti lokakarya berantai bersama sejumlah pihak lain termasuk budayawan.

Adapun, topik lokakarya yang akan digelar tersebut bakal membahas mengenai perencanaan, *masterplan*, dan detail desain bangunan fisik, yang kemudian disesuaikan dengan perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Menurut Basuki, dengan hal itu akan melahirkan banyak pilihan dengan sejumlah pertimbangannya, yakni apakah bakal berbentuk kota hijau, kota pintar, atau kota ringkas.

"Nanti, Ikatan Arsitek Indonesia juga rencananya diundang oleh Presiden Joko Widodo. Kita-kira untuk menerjemahkan keinginan istana seperti apa, kebutuhannya seperti apa, dari sisi pertahanan, efisiensi kantor, dan lainnya, jadi ada semuanya," jelas dia.

Menurutnya, ketika desain tersebut rampung, pemerintah sudah bisa melakukan

pembangunan selepas lahan benar-benar dibebaskan sehingga target pemindahan ibu kota pada 2024 bisa terlaksana.

Kendati demikian, meskipun Kementerian PUPR akan mulai tanpac gas pada 2020, pembangunan fisik gedung belum akan dimulai pada tahun tersebut.

Akan tetapi, pihaknya, akan memulai dengan pembangunan infrastruktur jalan raya dan saluran air terlebih dahulu.

"Dengan begitu maka orang akan lihat bentuk kotanya seperti apa. Jadi, mana yang dibangun pemerintah, mana yang dibangun swasta. Swasta juga kita buatkan tata ruangnya," ujarnya.

Sebelumnya, berkaitan dengan pelibatan pembangun dalam pembangunan ibu kota baru, pembangun akan mendukungnya apabila diberikan beragam insentif, seperti kemudahan dalam perizinan serta kepastian terkait dengan permintaan pasar.

Wakil Ketua Umum Bidang Tata Ruang, Kawasan dan Properti Ramah Lingkungan DPP Persatuan Perusahaan Realstat Indonesia (REI) Hari Ganie menuturkan bahwa swasta membutuhkan insentif dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan.

"Swasta dapat diajak apabila secara komersial menguntungkan. Namun, tawarkan dulu apa keuntungan yang dapat diberikan kepada swasta?" tuturnya kepada *Bisnis*, pekan lalu.

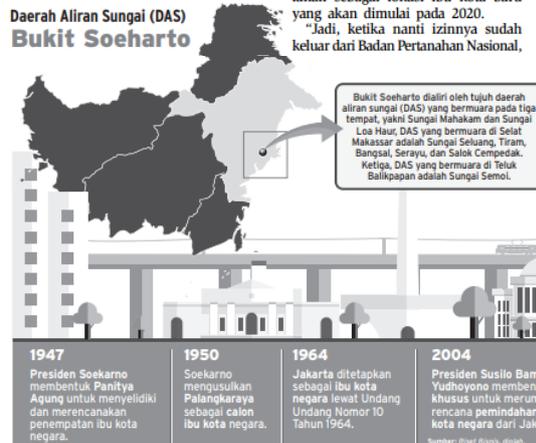
Sementara itu, Assistant Vice President Marketing PT Agung Podomoro Land Tbk., Alvin Andronicus mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung rencana pemindahan ibu kota setelah ada perencanaan jelas terkait dengan pengembangan infrastruktur di kawasan baru itu.

Setelah itu, pihaknya juga mengharapkan pembangunan ibu kota baru harus mampu menarik minat masyarakat untuk tinggal dan menetap di kawasan itu sehingga permintaan terhadap produk hunian juga tinggi.

Dia menambahkan bahwa pembangun juga membutuhkan insentif seperti kemudahan perizinan dalam pembangunan proyek komersial.

"Kami akan mendukung, tetapi saat ini proses dan biaya perizinan terlalu ribet," ujarnya. □

Daerah Aliran Sungai (DAS) Bukit Soeharto



Judul	100 Smart City: Gengsi Daerah Hambat Program Kota Pintar	Tanggal	Kamis, 16 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 25)		
Resume	Gengsi antarkepala daerah dinilai menjadi kendala program pengembangan 100 Kota Pintar yang sedang dicanangkan pemerintah. Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di sela-sela acara Gerakan Menuju 100 Smart City, Rabu (15/5). "Ada gengsi [dari] beberapa daerah yang segan atau tidak mau meniru daerah lain yang sudah berprestasi," tuturnya.		

► 100 SMART CITY

Gengsi Daerah Hambat Program Kota Pintar

Bisnis, JAKARTA — Gengsi antarkepala daerah dinilai menjadi kendala program pengembangan 100 Kota Pintar yang sedang dicanangkan pemerintah.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di sela-sela acara Gerakan Menuju 100 Smart City, Rabu (15/5).

"Ada gengsi [dari] beberapa daerah yang segan atau tidak mau meniru daerah lain yang sudah berprestasi," tuturnya.

Menurut Tjahjo, prestasi yang diraih oleh suatu daerah seharusnya membawa pengaruh positif ke daerah lain, serta mendorong munculnya komitmen dan kesamaan visi sehingga tiap daerah dapat bergerak bersama dalam mengorganisasi lingkungan masyarakat.

Adapun, Kemendagri menyiapkan empat strategi khusus guna mendukung pelaksanaan program pengembangan 100 Kota Pintar. *Pertama*, mendorong penerapan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kedua, menyusun dokumen terkait dengan rencana pembangunan daerah sebagai langkah awal mewujudkan pembangunan kota cerdas yang berkelanjutan sesuai dengan amanat Permendagri No. 7/2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Ketiga, mendorong perencanaan pembangunan kota pintar berdasarkan analisis mengenai proses rencana pembangunan yang komprehensif, berbasis data, serta informasi yang aktual dan akurat.

Keempat, mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat penyelesaian peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang daerah.

Tjahjo mengungkapkan, saat ini terdapat 51 Peraturan Daerah Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dari total 1.838 RDTR.

Adapun, dari total 100 daerah yang menjadi proyek pilot program pengembangan kota pintar, baru 13 wilayah yang telah menyusun dan menetapkan RDTR-nya.

Wilayah-wilayah tersebut a.l. Medan, Tanjung Pinang dan Bukit Bestari, DKI Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Surabaya, Sumenep, Yogyakarta, Sewon, Kuta Selatan, dan Bontang.

"Keberadaan RDTR tersebut merupakan dasar penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan sehingga

suatu daerah masuk ke dalam skala prioritas pembangunan wilayah sektoral dan pengembangan wilayah."

Ketika dihubungi terpisah, Direktur E-Government Kemenkominfo Bambang Dwi Anggono mengatakan, pemerintah juga menyiapkan beberapa strategi guna memastikan seluruh perangkat yang terhubung di dalam kota pintar aman.

Pemerintah, ujarnya, akan menguji kelayakan tiap gadget yang masuk ke Indonesia di Balai Uji. Kemenkominfo juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengamankan perangkat-perangkat teknologi yang ada di lingkungan pemerintah.

Kemenkominfo sendiri memiliki lima fokus utama dalam pengembangan kota pintar. *Pertama*, memastikan 100 pemerintah kabupaten/kota sudah memiliki rencana induk yang kuat dalam pengembangan kota pintar sesuai dengan fokus masing-masing.

Kedua, mendorong pemerintah daerah untuk tidak menjadi korban euforia teknologi.

"Termasuk berbelanja perangkat-perangkat yang sebenarnya bisa didapat dengan cara cuma-cuma. Misalnya, repot-repot membuat *data center*, padahal pemerintah membuat *data center gratis*," ujar Bambang kepada *Bisnis*, Selasa (14/5).

Ketiga, mendorong pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia. *Keempat*, mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi keahlian di bidang teknologi, pemanfaatan, dan sosialisasi konten.

Kelima, mendorong kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat untuk peduli terhadap keamanan informasi.

Co-Founder dan CTO Qlue Andre Hutagalung menilai, desain kota pintar memerlukan standarisasi enkripsi, autentikasi, serta protokol komunikasi antarperangkat.

Hal berikutnya yang perlu dilakukan terkait dengan keamanan adalah pembatasan jaringan pribadi antarperangkat komunikasi, pemanfaatan *disaster recovery center* (DRC), dan pemanfaatan perangkat keamanan jaringan untuk menghadapi serangan peretas maupun virus.

"Terutama terhadap serangan yang mengancam sistem yang berhubungan langsung dengan jaringan publik atau internet," jelasnya kepada *Bisnis*.

Andre melanjutkan, jika semua hal tersebut terpenuhi, akses dan komunikasi data akan aman serta privasi setiap warga negara terjaga dengan baik. (*Rahmad Fauzan*)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 16 Mei 2019
Media	Kompas (Halaman 1)		
Resume	Foto udara Jalan Tol Trans-Jawa di Gerbang Tol Probolinggo Timur, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (15/5/2019). Gerbang Tol Probolinggo Timur merupakan ujung paling timur Jalan Tol Trans-Jawa saat ini karena ruas Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi belum dibangun.		

Ujung Timur Jalan Tol Trans-Jawa



Foto udara Jalan Tol Trans-Jawa di Gerbang Tol Probolinggo Timur, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (15/5/2019). Gerbang Tol Probolinggo Timur merupakan ujung paling timur Jalan Tol Trans-Jawa saat ini karena ruas Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi belum dibangun.

Judul	Pascabencana Sulteng: Relokasi Berpotensi Bermasalah	Tanggal	Kamis, 16 Mei 2019
Media	Kompas (Halaman 15)		
Resume	Lahan untuk relokasi penyintas di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berpotensi bermasalah. Hal itu karena pemerintah tak punya anggaran untuk membebaskan lahan. Pemerintah berharap pemilik tanah menghibahkan tanahnya.		

PASCABENCANA SULTENG

Relokasi Berpotensi Bermasalah

PALU, KOMPAS — Lahan untuk relokasi penyintas di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berpotensi bermasalah. Hal itu karena pemerintah tak punya anggaran untuk membebaskan lahan. Pemerintah berharap pemilik tanah menghibahkan tanahnya.

Pascagempa disertai likuefaksi dan tsunami pada 28 September 2018, daerah bekas likuefaksi, tsunami, dan jalur sesar ditetapkan sebagai zona terlarang untuk pembangunan hunian baru. Semua penyintas direlokasi. Titik relokasi masih berada di Kelurahan Petobo.

Kebutuhan lahan untuk relokasi penyintas di Petobo diperkirakan mencapai 70 hektar untuk hunian 1.500 keluarga. Separuhnya berasal dari lahan HGU telantar yang dihibahkan Pemerintah Kabupaten Sigi. Se-

bagian lagi dari lahan yang dimiliki perseorangan.

Namun, relokasi terhambat pembebasan sebagian lahan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Presly Tampubolon, Rabu (15/5/2019), menyatakan, dalam skema rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa, tak ada anggaran pembebasan lahan. Karena itu, dari awal pemerintah menetapkan kawasan relokasi bagi penyintas gempa bumi, likuefaksi, dan tsunami di lahan HGU/HGB.

Presly mengatakan, status lahan untuk relokasi akan diverifikasi lagi. "Nanti diverifikasi, mana yang merupakan HGU, lahan mana yang berstatus hak milik perseorangan. Dari situ dirembuk, berapa luas tanah setiap pemilik lahan yang diserahkan ke pemerintah untuk pembangunan hunian

tetap," ucapnya.

John Drewa (38), salah satu pemilik lahan yang akan dijadikan kawasan relokasi, menyatakan tidak bermaksud mengabaikan alasan kemanusiaan, tetapi tanah miliknya yang akan dibangun hunian tetap harus dibeli. "Soal berapa nilainya, kami siap bernegosiasi dengan pemerintah," ucapnya.

Nurhasan (43), penyintas di Petobo, heran pemerintah tak menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan relokasi. Pembangunan hunian tetap penyintas salah satu tahap penting dalam penanganan pascabencana Sulteng. "Masa untuk hal sepeenting ini tak diantisipasi," ujarnya di Palu.

Ia berharap pemerintah daerah bisa mengajukan alokasi anggaran ke pemerintah pusat melalui APBD perubahan.

(VDL)

Judul	Bawen Paling Diantisipasi	Tanggal	Kamis, 16 Mei 2019
Media	Kompas (Halaman 16)		
Resume	Persiapan keselamatan dan kenyamanan para pemudik jelang arus mudik Lebaran terus dilakukan di titik simpul kemacetan, terutama di wilayah Bawen, Jawa Tengah.		



Kendaraan melintasi persimpangan pintu keluar Tol Bawen di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (15/5/2019). Akses dari Semarang menuju Magelang dan Salatiga di sekitar Bawen itu diprediksi menjadi salah satu titik rawan kemacetan lalu lintas saat puncak arus mudik Lebaran 2019.

Bawen Paling Diantisipasi

Persiapan keselamatan dan kenyamanan para pemudik jelang arus mudik Lebaran terus dilakukan di titik simpul kemacetan, terutama di wilayah Bawen, Jawa Tengah.

SEMARANG, KOMPAS — Upaya untuk mengantisipasi keselamatan dan kenyamanan masyarakat menjelang arus mudik Lebaran terus dilakukan. Bahkan, pihak terkait menyiapkan solusi mengatasi simpul kepadatan di titik-titik rawan kemacetan, termasuk menyediakan jalur alternatif.

Kepala Dinas Perhubungan Jateng Satriyo Hidayat pada dialog "Mudik Lancar Aman dan Nyaman" Prime Topic MNC Trijaya di Kota Semarang, Rabu (15/5/2019), mengatakan, wilayah Bawen diantisipasi sebagai titik yang paling berpotensi dipadati kendaraan pribadi saat mudik Lebaran. Sejumlah jalur alternatif disiapkan agar kendaraan menuju Yogyakarta tidak menumpuk.

Bawen akan menjadi titik temu antara kendaraan dari Pintu Tol Bawen menuju Yogyakarta dan kendaraan di jalan nasional arah Solo. Setiap masa libur panjang, di sekitar Terminal Bawen atau pertigaan Semarang-Solo-Yogyakarta kerap

padat karena kendaraan menunggu giliran berbelok.

Menurut Satriyo, total ada 14 titik di Jateng yang berpotensi terjadi kepadatan saat mudik Lebaran 2019. "Bawen yang paling kami antisipasi terjadi kepadatan," katanya.

Antisipasi itu tak terlepas dari tersambungunya Tol Trans-Jawa dari Merak, Banten, hingga Probolinggo, Jawa Timur. "Tahun ini diperkirakan 8,4 juta pemudik ke Jateng dan 6,8 juta di antaranya lewat jalur darat. Dari 6,8 juta, sekitar 40 persen di antaranya menggunakan tol," kata Satriyo.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Jateng Komisaris Besar Agus Triatmaja, selama masa mudik 2019, di Jateng, disiapkan 22.000 personel. Polisi akan dibantu sejumlah anggota instansi terkait dan siswa Sekolah Inspektur Polisi.

Keamanan pemudik

PT Lintas Marga Sedaya (LMS), pengelola Jalan Tol Cipali, telah menyiapkan kenya-

amanan dan keselamatan bagi para pengguna tol. Perbaikan dilakukan di sejumlah area peristirahatan, antara lain penambahan jumlah toilet dan menanam penghijauan.

Jumlah kendaraan yang melintas pada hari menjelang mudik diperkirakan mencapai kepadatan tertinggi pada H-5 Lebaran (31/5). Pengendara diminta lebih waspada saat melintasi jalan tol dengan panjang 116,7 kilometer itu. Jumlah kendaraan yang melintas pada puncak mudik pun bisa mencapai 80.912 kendaraan per hari.

General Manager Operasional PT LMS Suyitno Sari menambahkan, sebagai bentuk antisipasi akan ada penambahan 14 gardu di Gerbang Tol Palimanan Utama. Dengan demikian, total gardu yang akan beroperasi menjadi 26 pintu. Pada setiap gardu akan disediakan pembayaran dengan nontunai dan tunai. Hal itu sebagai antisipasi apabila kartu nontunai tidak berfungsi.

Menurut Kepala Unit Patroli Jalan Raya Polda Jawa Barat Ajun Komisaris Azis Syarifudin, kunci pencegahan kecelakaan adalah mengatur batas kecepatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Darat untuk jalan bebas hambatan, batas minimal kecepatan kendaraan 60 km per jam dan maksimal 100 km per jam.

Memuncak H-2

Dari Manado, Sulawesi Utara, dilaporkan, arus mudik Lebaran di Sulut diperkirakan memuncak pada H-1 sampai H-2 Lebaran. Pos pengamanan dan pelayanan akan didirikan di beberapa titik untuk meminimalkan kecelakaan.

Direktur Lalu Lintas Polda Sulut Komisaris Besar Ngurah Gunawan, Rabu, mengatakan, mudik Lebaran di Sulut tidak akan menimbulkan kemacetan signifikan. Hal itu karena peningkatan jumlah kendaraan di ruas-ruas jalan provinsi yang

keluar dari Manado tidak masif, hanya sekitar 50.000 dari jumlah kendaraan pada hari biasa.

"Kami perkiraan kendaraan yang akan datang dan keluar Manado meningkat 20 persen sampai 30 persen. Mayoritas pemudik menuju daerah Bolaang Mongondow Raya, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, sampai Gorontalo," kata Ngu-rah.

Warga Sulut akan mudik lewat jalur darat sehari sampai dua hari sebelum Lebaran karena jaraknya cukup dekat. Kami perkiraan tidak akan terjadi kemacetan, hanya padat. Namun, yang lebih kami khawatirkan adalah beberapa jalur yang rawan kecelakaan.

Beberapa ruas jalan yang dianggap rawan kecelakaan adalah Jalur Lingkar Luar Manado dekat Citraland dan Jalan Raya Manado-Tomohon. Kontur jalan yang berbukit, berkelok-kelok, dan bersebelahan dengan jurang rawan bagi pengguna jika lengah. (DIT/MEL/OKA)

Judul	BASUKI HADIMULJONO: Digusur Jalan Tol	Tanggal	Kamis, 16 Mei 2019
Media	Kompas (Halaman 24)		
Resume	Banyak ruas jalan tol dibangun ketika Basuki Hadimuljono menjabat Menteri PUPR. Namun, ternyata kediaman pribadi Basuki juga akan terkena jalur pembangunan Jalan Tol Becakayu.		



KOMPAS/NOBERTUS ARYA DWIANGGA

BASUKI HADIMULJONO **Digusur Jalan Tol**

Banyak ruas jalan tol dibangun ketika Basuki Hadimuljono menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, ternyata kediaman pribadi Basuki juga akan terkena jalur pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu.

"Benar, masak bohong. Jadi rumah saya kena, ha-ha-ha," kata Basuki ketika ditemui *Kompas* di sela-sela aktivitasnya, Rabu (15/5/2019), di Jakarta.

Basuki langsung menunjukkan gambar rencana *trase* Tol Becakayu yang akan dibangun di tepi Saluran Induk Tarum Barat. Jika dihitung dari tepi saluran induk itu, lahan yang diperlukan sepanjang 24,7 meter. Sementara pagar belakang rumah Basuki terletak 15 meter dari saluran induk itu.

Basuki mengatakan, rumah yang berada di Perumahan Pengairan Rawa Semut, Bekasi, itu didiami sejak ketiga anaknya masih kecil. Suatu ketika, Basuki pernah berencana untuk mengajak pindah keluarganya ke tempat lain. Namun, ketiga anaknya menolak rencana itu.

Kemudian sekitar setengah tahun yang lalu, Basuki mengetahui rumah pribadinya akan terkena *trase* Tol Becakayu. Meski mengetahui rumah pribadinya akan tergusur pembangunan Tol Becakayu, Basuki tetap meminta agar jalur itu tetap dipilih.

"Ya sudah kita ikuti aturan. Kan, pembebasan lahan di perkotaan tidak gampang. Ini, kan, lebih mudah karena mengikuti saluran," kata Basuki.

(NAD)